



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

TAHUN ANGGARAN 2022



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

JL. JENDRAL SUDIRMAN NO 182 TELP (0742) 21192 FAX 32260

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dapat tersusun. Penyusunan LKjIP merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Daerah Kota Semarang atas penggunaan anggaran di tahun 2022. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang lebih baik lagi. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat semakin ditingkatkan.

Kuala Tungkal, 15 Maret 2023,

**SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Ir. J. A. US SANUSI, M.Si
PENASIB NA UTAMA MADYA
NIP. 9680817 199203 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026.

Hasil capaian Lima belas Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah : ditargetkan 62,50, terealisasi 67,77.
2. Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan BARang sesuai SAP : ditargetkan 100%, terealisasi 100%.
3. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP sesuai target Daerah : ditargetkan 75%, terealisasi 75%.
4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat : ditargetkan 80,66, terealisasi 81,39.
5. Nilai Kematangan Perangkat Daerah : ditargetkan 29, terealisasi 28,10.
6. Skor LPPD : $3 < ST < 4$ terealisasi –
7. Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik : ditargetkan 85% terealisasi 85%
8. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan : ditargetkan 100% teralisasi 87,96%
9. Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi : ditargetkan Juara 3 Besar teralisasi 2 Besar
10. Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonisasi dan Sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-undangan : ditargetkan 100% terealisasi 100%
11. Persentase Naska Kerjasama Lingkup Dalam Negeri yang diimplementasikan ; ditargetkan 80% terealisasi 80%
12. Persentase Koordinasi Administrasi Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang diimplementasikan ; ditargetkan 100% terealisasi 100%
13. Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan ; ditargetkan 100% terealisasi 100%
14. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Bagian Barang dan Jasa : ditargetkan 100% teralisasi 100%
15. Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Urusan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan ; ditargetkan 100% teralisasi 100%.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 64.698.867.202,- dari total anggaran sebesar Rp 74.103.921.403,-, sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.405.054.201 atau 12,69%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kab. Tanjab Barat	2
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
2. Struktur Organisasi	2
3. Sumber Daya Manusia	6
C. Sistematika Penulisan	6

BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	8
B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja	13

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022	19
1. Ringkasan Penpaian Indikator Kinerja Utama	19
2. Ringkasan Pencapaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja.....	22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	24
C. Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah	40

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	46
---------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Tujuan Sekretariat Daerah	9
Tabel 2.2 : Rencana Target Sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026	15
Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah	13
Tabel 2.4 : Perjanjian Sekretariat Daerah Tahun 2022	21
Tabel 3.1 : Realisasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah	20
Tabel 3.2 : Ringkasan Pencapaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Sekreatris Daerah	22
Tabel 3.3 : Realisasi Anggaran Perbagian Sekretariat Daerah Kab. Tanjab Barat T.A 2022	42
Tabel 3.4 : Realisasi Anggaran Per-program Setda Tanjab Barat Tahun 2022	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdapat klausul yang menyebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal dan menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan SAKIP mencakup 6 (enam) unsur, yakni: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja. Penyelenggaraan SAKIP diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Instansi Pemerintah akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif, terbuka, dan dipercaya masyarakat sehingga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat Daerah sebagai unsur Penunjang pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretariat Daerah selalu berupaya meningkatkan kinerja dalam semua aspek, termasuk diantaranya penerapan good governance. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui lebih jelas tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, dijabarkan dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah maka mulai tahun 2019 terjadi perubahan struktur dalam Sekretariat Daerah.

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

a. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahkan dan mengkoordinasikan :

- 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Kewilayahan; dan

c) Subbagian Otonomi Daerah.

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

terdiri dari :

- a) Subbagian Bina Mental Spritual;
- b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
- c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

3) Bagian Hukum, terdiri dari :

- a) Subbagian Perundang-Undangan;
- b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
- c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.

4) Bagian Kerjasama, terdiri dari :

- a) Kasubbag Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
- b) Kasubbag Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
- c) Kasubbag Evaluasi Kerjasama;

**c. Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan,
membawahkan dan mengkoordinasikan :**

1) Bagian Perekonomian, terdiri dari :

- a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
- b) Subbagian Pengendalian & Distribusi Perekonomian; dan
- c) Subbagian Perencanaan dan Pengawas Bidang Mikro Kecil.

2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Penyusunan Program;
- b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan
- c) Sub Bagian Evaluasi

3) Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :

- a) Subbagian SDA, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
- b) Subbagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
- c) Subbagian SDA dan Energi Air.

4) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :

- a) Subbagian Pengelolaan Pengadaaan Barang/Jasa;
- b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
- c) Subbagian Pembinaan & Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan :

1) Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :

- a) Subbagian Pemberitaan;
- b) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; dan
- c) Subbagian Protokol.

2) Bagian Umum, terdiri dari :

- a) Subbagian TU, Pimpinan, Staf Ahli & Kepegawaian;
- b) Subbagian Perlengkapan; dan
- c) Subbagian Rumah Tangga.

3) Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Perencanaan;
- b) Sub Bagian Pelaporan; dan
- c) Sub Bagian Keuangan.

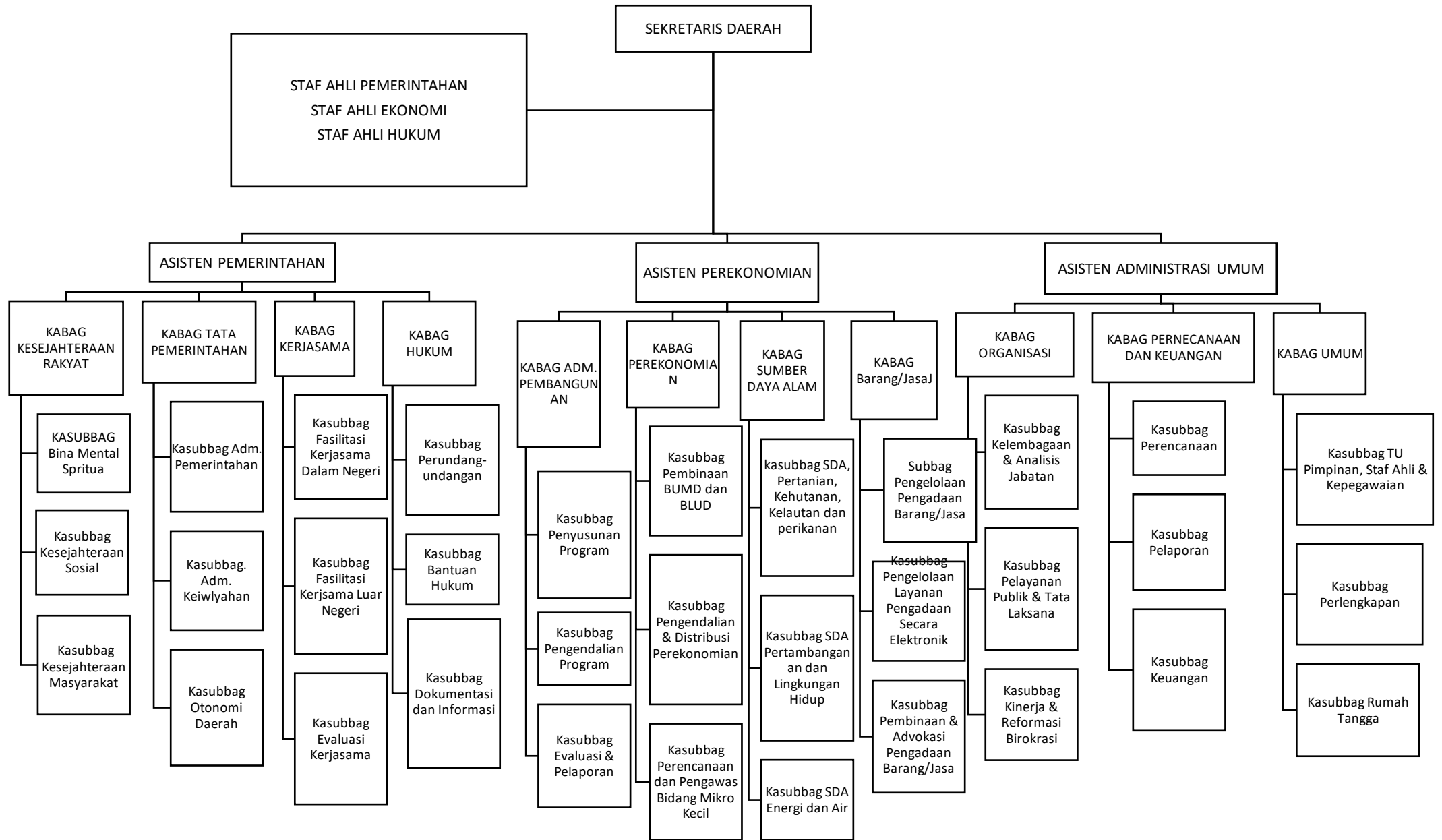
4) Bagian Organisasi, terdiri dari :

- a) Subbagian Kelembagaan;
- b) Subbagian Tata laksana dan Pelayanan Publik; dan
- c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Analisa Jabatan

e. Kelompok Jabatan Fungsional, dan

f. Staf Ahli.

- 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- 3. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik



3. Sumber Daya Manusia

Dari sisi sumber daya aparatur di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada bulan Desember 2022 jumlah PNS tercatat sebanyak 124 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 91 orang dan perempuan 33 orang.

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Berdasarkan Golongan

Golongan IV					Golongan III				Golongan II				Golongan I				Total
A	B	C	D	E	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
3	9	5	1		29	10	17	31			4	18				2	124

Sumber : Bagian Umum 2022

Tabel 1.2
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S3	S2	S1	D1-D3	SLTA	SLTP	SD	TOTAL
	14	67	8	33	1	1	124

Sumber : Bagian Umum 2022

Adanya hubungan komunikatif dan kekeluargaan yang erat antar pegawai di Sekretariat Daerah semakin memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini keterbatasan yang dimiliki oleh Pegawai yang satu dapat ditutupi dengan kelebihan (kemampuan) pegawai yang lain tanpa harus terikat secara struktural. Selanjutnya apabila ada kesulitan yang dihadapi oleh beberapa orang pegawai dalam pelaksanaan tugas, maka dilakukan kerjasama dengan yang lain untuk mengatasi kesulitan tersebut.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum Organisasi

D. Sistematika Penulisan LKJIP

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai : Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja. Isi yang dipaparkan mencakup sasaran yang ingin diraih SKPD dalam tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD.

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengungkapan akuntabilitas kinerja diutamakan menitikberatkan pada pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PADA INDIKATOR KINERJA UTAMA

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam lima tahun ke depan, Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Fokus utama tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan prioritas utama pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan untuk Pelayanan Publik

Prioritas utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mendukung tercapainya Visi & Misi Kepala Daerah serta program prioritas pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2022 berdasarkan pada dokumen Renstra Setda yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2. sebagai berikut:

Tabel. 2.1.
Tujuan Sekretariat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Kelembagaan serta tatakelola Keuangan yang efektif. 2. Meningkatnya Kemampuan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. 3. Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah.
2.	Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan. 3. Meningkatnya implementasi Kerjasama dalam dan Luar Negeri. 4. Meningkatnya Koordinasi Administrasi Perumasan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang diimplementasikan. 5. Meningkatnya koordinasi implemementasi kebijakan pengendalian Sumber Daya Alam.

Tabel 2.2
RENCANA TARGET SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016-2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran						Kondisi Akhir
			Pada Tahun ke..						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Kelembagaan serta Tatakelola Keuangan yang efektif	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah.	62,50 (B)	62,50 (B)	62,50 (B)	62,50 (B)	62,50 (B)	62,50 (B)	
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai AKIP sesuai target Daerah	75%	80%	83%	88%	90%	100%	
		Nilai survei Kepuasan Masyarakat	80,70	80,80	81,00	85,50	89,00	100%	
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	32	35	40	43		
2.	Meningkatnya Kemampuan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah.	Skor LPPD	3<STSAST	3<STSAST	3<STSAST	3<STSAST	3<STSAST	3<STSAST	
		Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	85,00%	87,00%	90,00%	95,00%	98,00%	72,00	

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANJIAN KINERJA

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tabel 2.3.

Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
				ASALAN	FORMULASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang efektif	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Peraturan MenPAN-RB No.12 Tahun 2015 Tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Bag. Perencanaan & Keuangan	Sekretaris Daerah	
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	1. Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang SAP 2. Pemandagri no.64 tahun 2013 tentang penetapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah	Realisasi penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	Bag. Perencanaan & Keuangan	Sekretaris Daerah	
		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai target daerah	%	Peraturan MenPAN-RB No.12 Tahun 2015 Tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah	Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP lebih atau sama dengan target sakip daerah	Bag. Organisasi	Sekretaris Daerah	
		Nilai Suvei Kepuasan Masyarakat	Nilai	Peraturan MenPAN-RB No. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah total dari nilai presepsi per unsur	X Nilai Penimbang	Bag. Organisasi dan Bag. Umum	Sekretaris Daerah
	Jumlah total unsur yang terisi							
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	Peraturan MenPAN-RB No. 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP Admisntrasi pemerintah	Hasil Suvei	Bag. Organisasi	Sekretaris Daerah	

2.	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	Skor LPPD	Kategori	Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewajiban laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada Presiden melalui menteri dalam negeri untuk Gubernur dan kepada menteri dim negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota	Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri		Bag. Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah
		Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	%	1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang berkinerja baik	x 100%	Bag. Tata Pemerintahan	Sekretaris Daerah
				2. Peraturan MenPAN-RB no. 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Jumlah Kecamatan yang ada di kab. Tanjung Jabung Barat			
3.	Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang keagamaan	%	Untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan dalam upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Relisasi hasil koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan terhadap yang ditargetkan		Bag. Kesra	Sekretaris Daerah
		Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Kategori	Untuk meningkatkan prestasi qori-qoriah pada kegiatan MTQ tingkat provinsi sebagai upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Hasil Lomba MTQ		Bag. Kesra	Sekretaris Daerah
4.	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	1. UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang harmonis / sinkron dibanding dengan peraturan perundang-undangan		Bag. Hukum	Sekretaris Daerah
				2. Permendagri no. 1 tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah				
				3. Pepres no. 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan atas UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan				

				4. Peraturan Menkumham No.20 tahun 2015 tentang tata cara pengharmonisasian, pembulatan & pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan			
5.	Meningkatnya Implementasi kerjasama dalam dan luar negeri	Persentase Naska Kerjasama Lingkup dalam Negeri yang diimplementasikan	%	1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Pasal 364 - 372;	Persentase naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ruang lingkup dari naskah kerjasama aktif lingkup dalam negeri	Bag. Kerjasama	Sekretaris Daerah
6.	Meningkatnya Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	Persentase Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	%	Mengukur implementasi pelaksanaan hasil koordinasi, kebijakan bidang perekonomian	Realisasi implementasi koordinasi, administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian	Bag. Perekonomiam	Sekretaris Daerah
7.	Meningkatnya kualitas administrasi Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	%	Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 2015 tentang Tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan realisasi pembangunan pada tanggal 10 bulan berikutnya _____ x 100%	Bag. Adminstari Pembangunan	Sekretaris Daerah
					Jumlah Peragkat Daerah		
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penyedia barang dan jasa melalui bagian barang dan jasa	%	Peraturan Presiden RI No. 4 tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah	Jumlah usulan pemilihan penyedia barang / jasa dari prangkat daerah melalui bagian pengelolaan barang dan jasa	Bag. PBJ	Sekretaris Daerah

8.	Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan sumber daya alam yang diimplementasikan	%	Mengukur implementasi pelaksanaan hasil koordinasi, kebijakan bidang urusan sumber daya alam	Realisasi implementasi koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang Urusan Sumber Daya Alam	Bag. Sumber Daya alam	Sekretaris Daerah	
----	--	--	---	--	---	-----------------------	-------------------	--

2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pejabat eselon wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan.

Tabel. 2.4.
Perjanjian Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Kelembagaan Serta Tata Kelola Keuangan yang efektif.	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	>62,50
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Abrang Sesuai SAP	100%
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Sesuai Target Daerah	75%
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,66
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29
2.	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam Menyelenggarakan Otonomi Daerah.	Skor LPPD	3<ST<4
		Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	85%
3.	Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Relegius Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan	100%
		Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	3 Besar
4.	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	100%

5.	Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Naska Kerjasama Lingkup Dalam Negeri yang Diimplementasikan	80%
6.	Meningkatnya Koordinasi Administrasi Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Diimplementasikan	Persentase Koordinasi Administrasi Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang di Implementasikan	100%
7.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Bagian Barang dan Jasa	100%
8.	Meningkatnya Koordinasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan.	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2022 yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2022 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (Performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan menggunakan pijakan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA
1.	91≤	Sangat tinggi
2.	76≤90	Tinggi
3.	66≤75	Sedang
4.	51≤65	Rendah
5.	≤50	Sangat Rendah

1. RINGKASAN PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022.

Bagian ini akan menguraikan ringkasan pencapaian kinerja indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Indikator Utama Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022			Realisasi
			Tagret	Realisasi	%	2021
1.	Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Kelembagaan Serta Tata Kelola Keuangan yang Efektif	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	>62,50	67,77%	100%	60,39
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Sesuai Target Daerah	100%	100%	100%	100%
		Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	80,66	-	-	81,45
2.	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam Menyelenggarakan Otonomi Daerah	Skor LPPD	3<ST<4	-	-	
		Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	87,00%	87,00%	100%	85,00%
3.	Meningkatnya Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Relegius dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan	100%	88,88%	88,88%	86,44%
		Peringkat Prestasi MTQ tingkat Provinsi	3 Besar	2 Besar	100%	3 Besar
4.	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	146,93%
5.	Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Naskah Kerjasama Lingkup Dalam Negeri yang di Implementasikan	80%	80%	100%	100%
6.	Meningkatnya Koordinasi Administrasi Perumusan dan	Persentase Koordinasi Administrasi Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	100%

	Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang di Implementasikan					
7.	Meningkatnya Kualitas Administasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	100%	100%	100%	91,83%
		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penyedia barang dan Jasa Melalui Bagian Barang dan Jasa	100%	100%	100%	62,12%
8.	Meningkatnya Koordinasi Impelementasi Kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Bidang Urusan Sumber Daya Alam yang diImplementasikan	100%	100%	100%	100%

2. RINGKASAN PENCAPAIAN KINERJA PADA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Tabel 3.2

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Pada Renstra Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi 2021
				Target	Realisasi	Satuan	
1.	Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Kelembagaan Serta Tata Kelola Keuangan yang efektif.	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	62,50	>62,50	67,77	Nilai	60,39
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Abrang Sesuai SAP	100%	100%	100%	%	100%
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Sesuai Target Daerah	75,00	75,00%	75,00%	%	75,00%
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,70	80,66	81,39	Nilai	81,45
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	29	28,10	Nilai	-
2.	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam Menyelenggarakan Otonomi Daerah.	Skor LPPD	3<ST<4	3<ST<4	-	Nilai	2,7847(T)
		Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	87,00%	87,00%	87,00%	%	85,00%
3.	Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Relegius Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan	100%	100%	87,96%	%	86,44%
		Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	3 Besar	3 Besar	2 Besar	Peringkat	3 Besar

4.	Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	93,33%	%	146,93%
5.	Meningkatnya Implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Naska Kerjasama Lingkup Dalam Negeri yang Diimplementasikan	100%	100%	100%	%	100%
6.	Meningkatnya Koordinasi Administrasi Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Diimplementasikan	Persentase Koordinasi Administrasi Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang di Implementasikan	100%	100%	100%	%	94,44%
7.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	100%	100%	100%	%	91,83%
		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Bagian Barang dan Jasa	100%	100%	104%	%	62,12%
8.	Meningkatnya Koordinasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan.	100%	100%	100%	%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. **Sasaran Nomor 1** : Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Kelembagaan Serta Tata Kelola Keuangan yang efektif :

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi
		Renstra	Target	Realisasi	%	Tahun 2021
1.	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	62,50	>62,50	67,77	Nilai	60,39
2.	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan barang Sesuai SAP	100%	100%	100%	%	100%

PROGRAM KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi
			Target	Realisasi	%	Tahun 2021
1.	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang berkualitas dan Tepat waktu	100	100	%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Bagian Setda yang diselaraskan	4	4	Dok.	4 Dok.
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tersusun dengan Baik	100	100	%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	131	131	Orang	131
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1	1	Dok	1 Dok

		Pelaksanaan Tugas ASN				
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	Dok	2 Dok	
Penyusunan Pelaporan dan Analiss Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	Dok	2 Dok	

Pada tahun 2022 Kinerja yang berhasil dicapai adalah Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu yaitu 100% didukung oleh Jumlah dokumen perencanaan bagian Setda yang diselaraskan yang ditargetkan sebanyak 4 dokumen tercapai 4 Dokumen atau berhasil mencapai target 100%.

Pada Indikator Persentase Laporan tersusun dengan Baik yaitu 100%, didukung oleh banyaknya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 131 orang, jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi dengan target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen, Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 2 Dokumen, realisasi 2 Dokumen, dan Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognos realisasi anggaran dengan target 2 Dokumen terealisasi 2 Dokumen, atau sebesar 100%.

Sasaran Nomor 1 : Terwujudnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan Publik, dan Kelembagaan Serta Tata Kelola Keuangan yang efektif.

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2022			REALISASI
		Renstra	Target	Realisasi	%	Tahun 2021
1.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Sesuai Target Daerah	75	75%	75%	%	100%
2.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,70	80,66	81,39	Nilai	81,45
3.	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	29	28,10	Nilai	

PROGRAM KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai melalui sub kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
			Target	Realisasi	%	
1.	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun LKPj-IP	100	100	%	100%
		Jumlah Perangkat Daerah dengan mutu Pelayanan Baik (B)	31	31	Opd	31 OPD
		Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran	100	100	%	96,73%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dan Analisis Jabatan	3	3	Dok.	3 Dok.
Fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4	4	Lap	4 Lap	
Peningkatan Kinerja reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	2	Dok	2 Dok.	

Pada indikator persentase perangkat daerah yang Menyusun LKPj-IP dengan target 100% terealisasi 100%, Jumlah perangkat daerah dengan Mutu Pelayanan Baik (B) dengan target 31 OPD terealisasi 31 OPD, Persentase Perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran dengan target 100% terealisasi 100%. Semua indikator ini telah memenuhi target,dengan didukung melalui :

1. Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan target 3 Dokumen terealisasi 3 Dokumen

2. Jumlah Laporan hasil fasilitasi pelayanan public dan tata laksana sebanyak 4 laporan.
3. Jumlah Dokumen kinerja dan reformasi birokrasi sebanyak 2 Dokumen.

2. Sasaran Nomor 2 : Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam Menyelenggarakan Otonomi Daerah.

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2022			REalisasi
		Renstra	Target	Realisasi	%	Tahun 2021
1.	Skor LPPD	3<ST<4	3<ST<4	-	Nilai	2,7847(T)
2.	Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	87,00	87,00	87,00	%	85,00

PROGRAM KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berhasil dicapai :

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
			Target	Realisasi	%	
1.	Administrasi Tata Pemerintah	Persentase keterisian data IKK LPPD	100	100	%	100%
		PersentasePermasalahan batas wilayah yang diselesaikan	100	100	%	100%
		Persentase optimalisasi pelayanan administrasi terpadu di kecamatan (PATEN)	100	100	%	100%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4	4	Dok.	4 Dok.

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3	3	Dok,	3 Dok,
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3	3	Dok	3 Dok.

Pada Tahun 2022 indikator Persentase keterisian data IKK LPPD, Persentase Permasalahan batas wilayah yang diselesaikan, Persentase optimalisasi pelayanan administrasi terpadu dikecamatan (PATEN) dengan target 100% dan realisasi yang berhasil dicapai yaitu 100%, hal ini didukung oleh terealisasinya indikator pada sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan indikator jumlah dokumen hasil penataan Administrasi Pemerintahan sebanyak 4 Dokumen.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan indikator Jumlah DOkumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan sebanyak 2 Dokumen
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah sebanyak 3 Dokumen.

3. Sasaran Nomor 3 : Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Nilai-nilai Relegius Dalam Kehidupan Bermasyarakat.

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi
		Renstra	Target	Realisasi	%	Tahun 2021
1.	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan	100	100	87,96	%	86,44%
2.	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	3 Besar	3 Besar	2 Besar	Peringkat	3 Besar

PROGRAM KEGIATAN

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berhasil dicapai

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
			Target	Realisasi	%	

1.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	100	100	%	
		Persentase Fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial	100	88,89	%	
		Persentase fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat	100	75,00	%	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8	8	Dok.	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian kinerja terkait kesejahteraan social yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	9	8	Dok,	

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	3	Dok	
--	---	---	---	-----	--

Pada Tahun 2022 indikator Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan meningkat sebesar 87,96 dibandingkan pada Tahun 2021 hanya sebesar 86,44%.

Indikator persentase fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan social tidak mencapai target 100% atau hanya sebesar 88,89% hal ini karena dalam sub kegiatan jumlah dokumen tidak memenuhi target sebanyak 9 dokumen terealisasi hanya 8 dokumen, dalam hal ini tahapan-tahapan proses kegiatan hibah sarana Pendidikan keagamaan dan sarana hibah yang cukup Panjang mulai dari survey lokasi di12 Kecamatan sampai penyelesaian Administrasi SK Bupati 593.Kep.Bup/Kesra/2022 tentang Penerima dan Besaran Hibah.

Pada Indikator Persentase fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat tidak mencapai target sebesar 75,00%. Hal ini karena dalam sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat tidak memenuhi target sebanyak 3 Dokumen karena ada 1 kegiatan yang batal dilaksanakan yaitu Pelayanan Terpadu Sidang Isbat Nikah karena data yang akan disidangkan belum memenuhi batas minimal siding yaitu 50 Pasang sementara yang tersedia banya 17 Pasang.

4. Sasaran Nomor 4 : Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi
		Renstra	Target	Realisasi	%	Tahun 2021
1.	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan	100	100	100	%	146,93%

Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan					
---	--	--	--	--	--

PROGRAM KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berhasil dicapai :

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
			Target	Realisasi	%	
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang dibuat	100	100	%	100
		Jumlah Kasus/Perkara Litigasi yang difasilitasi	3	3	Kasus	3
		Persentase Naskah PHD dan Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan	100	100	%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4	4	Produk	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	2	Kasus	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	5	5	Produk		

Pada Tahun 2021 Indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 146% didapat dari beberapa jumlah indikator yang melebihi target dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah sebanyak : 12 Perda terealisasi 15 perda
- 2) Jumlah Laporan AKSI HAM : 4 kali Lap. AKSI HAM realisasi 8 kali
- 3) Jumlah Koordinasi dan konsultasi Penetapan Raperda : 4 kali realisasi 15 kali
- 4) Jumlah Laporan SJIDH : 1 Lap. Realisasi 2 Lap
- 5) Jumlah Produk Hukum yang disebarluaskan : 600 Buku realisasi 700 Buku

Pada Tahun 2022 Indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang dibuat telah mencapai target 100%, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja tersebut adalah fasilitasi penyusunan produk hukum, sehingga dapat terwujud kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintah dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun. Dalam tahun 2022 telah diterbitkan Produk Hukum Daerah yang terdiri dari 4 Dokumen dengan rincian sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah sebanyak : 10 Perda
2. Peraturan Bupati sebanyak : 40 Perbup
3. SK Bupati sebanyak : 796 SK
4. SK Sekretaris Daerah sebanyak : 138 SK

Bagian Hukum diTahun 2022 memberikan bantuan Hukum dengan Jumlah Kasus/Perkara Litigasi yang difasilitasi telah mencapai target 100% atau sebanyak 2 kasus. Indikator Persentase Naskah PHD dan Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan sebanyak 5 dokumen.

5. Sasaran Nomor 5 : Meningkatkan Implementasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi
		Renstra	Target	Realisasi	%	Tahun 2021
1.	Persentase Naska Kerjasama Lingkup Dalam Negeri yang Diimplementasikan.	100	100	100	%	100%

PROGRAM KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berhasil dicapai :

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
			Target	Realisasi	%	
1.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama antar daerah,	100	100	%	100

	Lembaga/Perorangan dalam daerah yang terfasilitasi				
	Persentase Kerjasama antar daerah, Lembaga/Perorangan luar Negeri yang Terfasilitasi.	100	100	%	100%
Fasilitasi Kerjasama Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	3	3	Dok	3 Dok
Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	2	2	Dok	2 Dok.
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	5	5	laporan	5 Lap.

Pada Tahun 2022 Indikator Persentase Kerjasama antar daerah, Lembaga / Perorangan dalam daerah yang terfasilitasi, Persentase Kerjasama antar daerah, Lembaga/Perorangan luar Negeri yang Terfasilitasi. Telah berhasil dilaksanakan sesuai target 100%. Didukung melalui :

Jumlah dokumen hasil fasilitasi Kerjasama dalam negeri sebanyak 3 dokumen, yaitu telah menandatangani MoU sebanyak 41 MoU dan PKS

Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri sebanyak 2 Dokumen, namun belum adanya Kerjasama Luar Negeri.

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama sebanyak 5 Dokumen,

- 6. Sasaran Nomor 6 :** Meningkatnya Koordinasi Administrasi Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Diimplementasikan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi
		Renstra	Target	Realisasi	%	Tahun 2021
1.	Persentase Koordinasi Administrasi Perumusan dan Evaluasi Kebijakan	100	100	100	%	94,44%

Perekonomian Daerah yang di Implementasikan.					
--	--	--	--	--	--

PROGRAM KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berhasil dicapai :

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
			Target	Realisasi	%	
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah BUMD dalam kondisi baik	3	2	BUMD	2
		Persentase hasil koordinasi monitoring dan pembinaan pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti.	100	100	%	100%
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi pengendalian perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100	100	%	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	2	Dok	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	2	Dok	

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2	2	Dok	
--	---	---	---	-----	--

Indikator Jumlah BUMD dalam kondisi baik sebanyak 3 BUMD yaitu PT. BPR Tango Rajo, PT. Jabung Barat Sakti dan Bank9 Jambi, pada PT. Tanjab Sakti belum terpenuhinya atau belum terisinya struktur organisasi dan kendala dalam mendapatkan permodalan anggaran PT. Jabung Barat Sakti, serta kurang aktifnya BUMD tersebut dalam mencari peluang usaha.

Pada Tahun 2022 indikator Persentase hasil koordinasi monitoring dan pembinaan pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti dan Persentase hasil monitoring dan evaluasi pengendalian perekonomian daerah yang ditindaklanjuti, hal ini didukung oleh tercapainya indikator pada sub kegiatan-kegiatan, yang terdiri dari ;

- 1) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sebanyak 2 Dokumen
- 2) Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian sebanyak 2 Laporan.
- 3) Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil sebanyak 2 Dokumen

7. Sasaran Nomor 7 : Meningkatnya Kualitas Administrasi Pembangunan Daerah.

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi
		Renstra	Target	Realisasi	%	Tahun 2021
1.	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan.	100	100	100	%	100%

PROGRAM KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Program Perekonomian dan Pembangunan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
			Target	Realisasi	%	

1.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah.	100	100	%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	1	Dok	1 Dok
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	1	Dok	1 Dok.
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	1	1	Dok	1 Dok.

Pada Indikator Kinerja Persentase Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah berhasil mencapai target dengan didukung keberhasilan dalam beberapa sub kegiatan, yaitu :

- 1) Fasilitasi penyusunan program pembangunan dengan indikator jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah dengan jumlah 1 dokumen
- 2) Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi program pembangunan sebanyak 1 Laporan
- 3) Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 1 dokumen.

Sasaran Nomor 7 : Meningkatkan Kualitas Administrasi Pembangunan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi
		Renstra	Target	Realisasi	%	Tahun 2021

1.	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Penyedia Barang dan Jasa Melalui Bagian Barang dan Jasa.	100	100	100	%	62,12%
----	--	-----	-----	-----	---	--------

Meningkatnya realisasi tahun 2022 karena program kegiatan yang berhasil

PROGRAM KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

Program Perekonomian dan Pembangunan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
			Target	Realisasi	%	
1.	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan PBJ.	100	100	%	100%
		Persentase OPD yang melaporkan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan	100	100	%	100%
		Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	100	100	%	100%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150	150	Keg.	100
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Kegiatan layanan pengadaan secara Elektronik	44	44	Keg.	1 Dok.	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	80	0	Orang		

Pada indikator kinerja Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan PBJ, Persentase OPD yang melaporkan realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan, dan Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas sesuai dengan target yaitu 100%. Didukung melalui Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 150 kegiatan, Jumlah Kegiatan layanan pengadaan secara Elektronik sebanyak 44 Kegiatan,

Pada Tahun 2022 kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa tidak tersedia Anggaran pada Sub. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sehingga target tidak dapat terealisasi, Pada Tahun 2023 telah dianggarkan namun tidak spesifik untuk belanja Pelatihan merupakan Tupoksi dari OPD BKPSDM, sehingga akan dilakukan sinergisitas antar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan BKPSDM Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan Singkat/ Sosialisasi kepada Pengelola Pengadaan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.

8. Sasaran 8 : Meningkatkan Koordinasi Implementasi Kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi
		Renstra	Target	Realisasi	%	Tahun 2021
1.	Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan Sumber Daya Alam yang diimplementasikan.	100	100	100	%	100%

PROGRAM KEGIATAN YANG BERHASIL

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu

Program Perekonomian dan Pembangunan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Tahun 2021
			Target	Realisasi	%	
1.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan	100	100	%	100%

	bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.				
	Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan bidang pertambangan dan lingkungan hidup	100	100	%	100%
	Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan bidang energi dan air.	100	100	%	100%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal dan Tenaga KERja	1	1	Dok	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, perhubungan, Statistik	1	1	Dok.	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen hasil KOordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	1	1	Dok.	

	Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
--	---	--	--	--	--

Pada Tahun 2022 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan Indikator Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan bidang pertambangan dan lingkungan hidup, serta Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan bidang energi dan air, telah mencapai target perencanaan yaitu sebesar 100%.

Tercapainya indikator tersebut didukung melalui tiga sub kegiatan yaitu Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, Kebijakan Energi dan Air.

C. AKUNTABILITAS KEAUNGAN

1. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat dua obyek yang menghasilkan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keduanya masuk dalam kategori Retribusi Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan Pemungutannya dilakukan oleh OPD penghasil, dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah.

Target dan Realisasi Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah adalah :

Target	Rp. 110.000.000,-
Realisasi	Rp. 60.160.000,-
Selisih Kurang	Rp. (49.840.000,-)

Realisasi Retribusi Daerah mencapai 54,69 % dari target Retribusi Daerah.

Rincian Penerimaan Retribusi Daerah dan Retribusi pemakaian kendaraan bermotor pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Selisih	%	Realisasi 2021
	Sekretariat Daerah	110.000.000,-	60.160.000,-	49.840.000,-	54,69%	52.580.000,-
1	Sewa Mess Tanjab Barat	30.000.000,-	27.360.000,-	2.640.000,-	91,20%	24.780.000,-

2	Sewa Gedung/Aula & Ruang Pola/Balai Pertemuan	50.000.000,-	20.000.000,-	30.000.000,-	40,00%	11.550.000,-
3	Sewa Gedung Eks Serbaguna	5.000.000,-	4.000.000,-	1.000.000,-	80,00%	500.000,-
4	Sewa Kendaraan Dinas Bus	25.000.000,-	8.800.000,-	16.200.000,-	35,2%	15.750.000,-

Permasalahan :

Tidak tercapainya Retribusi dikarenakan :

- a) Kurangnya sarana dan prasarana
- b) Banyak berdirinya penginapan sejenis

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

- a) Dilakukan pengecatan, perbaikan dan pemeliharaan secara rutin
- b) Dilakukan pemasaran secara online/selebaran

2. ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

Kebijakan belanja berdasarkan Perangkat Daerah di tahun 2022 diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 tanggung jawabnya untuk memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan. Pengalokasian pagu anggaran belanja yang direncanakan oleh Perangkat Daerah dengan prinsip money follow program dimana hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitasnya. Program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan struktur sesuai dengan ketentuan terbaru.

Realisasi anggaran belanja pada Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Anggaran	: Rp. 74.103.921.403,-
Realisasi	: Rp. 64.698.867.202,-
Selisih Kurang	: Rp. 9.405.054.201,-

Realisasi Belanja sebesar 87,31% atau kurang belanja 12,69% dari Anggaran Belanja Tahun 2022.

Realisasi Keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tiap-tiap Bagian pada Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3

**Realisasi Anggaran PerBagian Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2022**

No	Unit Kerja	Anggaran	Realisasi	%
1	Bagian Umum	23.405.992.059,00	20.273.387.448,00	86,61%
2	Bagian Perencanaan dan Keuangan	27.922.494.904,00	24.532.057.137,00	87,85%
3	Bagian Kesejahteraan Masyarakat	11.897.805.504,00	9.120.551.077,00	76,66%
4	Bagian Hukum	934.301.175,00	922.166.175,00	98,70%
5	Bagian Administrasi Pembangunan	301.438.200,00	254.907.750,00	84,56%
6	Bagian Tata Pemerintahan	702.221.375,00	602.238.915,00	85,76%
7	Bagian Organisasi	507.333.473,00	460.201.700,00	90,71%
8	Bagian Sumber Daya Alam	438.758.700,00	407.014.200,00	92,76%
9	Bagian Perekonomian	4.436.594.000,00	4.299.038.000,00	98,91%
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.878.936.736,00	2.833.395.300,00	98,42%
11	Bagian Kerja sama	628.599.777,00	528.723.000,00	84,04%
12	Bagian Pengadaan Barang Jasa	499.446.500,00	465.636.500,00	84,56%
	J U M L A H	74.103.921.403,00	64.698.867.202	87,31%

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretaris Daerah Sebagai Berikut :

**Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
Setelah perubahan Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat**

No.	Program dan Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	74.103.921.403,-	64.698.867.202,-	87,31%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	148.860.600,-		
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	148.860.600,-	132.084.400,-	88,73%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	148.860.600,-	132.084.400,-	88,73%
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	17.736.463.660,-	16.089.503.224,-	90,71%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.470.193.000,-	14.903.196.724,-	90,49%
No.	Program dan Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.060.920.000,-	1.016.629.500,-	95,83%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	136.550.000,-	117.447.000,-	86,01%
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	68.800.000,-	52.230.000,-	75,92%
	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	123.750.000,-	102.046.000,-	86,22%

6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	123.750.000,-	102.046.000,-	82,46%
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		599.151.800,-	426.833.350,-	71,24%
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	489.131.800,-	384.021.000,-	78,50%
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	110.020.000,-	42.812.350,-	38,91%
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,-	0,-	-
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		14.103.930.725,-	12.123.603.352,-	85,95%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	302.563.865,-	209.382.750,-	95,97%
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	497.285.257,-	482.692.400,-	97,07%
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.026.177.119,-	992.315.680,-	96,70%
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.376.505.519,-	2.679.716.120,-	79,36%
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.711.215,-	51.910.350,-	93,18%
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.845.768.750,-	7.626.585.052,-	86,22%
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		8.807.607.859,-	8.719.224.475,-	99,00%
9917	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.068.244.799,-	5.057.126.000,-	99,78%
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.739.363.060,-	3.662.098.475,-	97,93%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		3.364.460.675,-	2.611.474.603,-	77,62%
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	447.025.000,-	421.550.000,-	94,30%
19	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	1.947.500.000,-	1.264.125.003,-	64,91%
20	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	336.725.000,-	311.745.000,-	92,58%
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	633.210.674,-	614.054.600,-	96,97%
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		5.016.528.750,-	4.018.837.720,-	80,11%
No.	Program dan Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	2.849.099.000,-	2.285.884.195,-	80,23%
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	864.585.000,-	534.386.300,-	61,81%
24	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.302.844.750,-	1.198.567.225,-	92,00%

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		1.067.732.894,-	581.838.461,-	86,22%
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.067.651.894,-	581.838.461,-	86,22%
PENATAAN ORGANISASI		507.333.473,-	460.201.700,-	90,71%
26	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	90.094.507,-	83.749.300,-	92,96%
27	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	145.234.507,-	136.550.400,-	94,02%
28	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	272.004.459,-	239.902.000,-	88,20%
PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		2.878.936.736,-	2.833.395.300,-	98,42%
29	Fasilitasi Keprotokolan	374.419.800,-	374.219.800,-	99,95%
30	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	544.500.000,-	527.115.500,-	96,81%
31	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.960.016.936,-	1.932.060.000,-	98,57%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		14.162.927.831,-	11.173.229.167,-	78,89%
ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN		702.221.375,-	602.238.915,-	85,76%
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	380.989.880,-	349.499.500,-	91,37%
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	159.261.300,-	111.831.300,-	70,22%
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	161.970.195,-	140.908.115,-	87,00%
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		11.897.805.504,-	9.120.551.077,-	76,66%
4	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	8.353.506.328,-	6.449.301.354,-	77,20%
5	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3.407.695.726,-	2.549.814.723,-	74,83%
6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	136.603.450,-	121.435.000,-	88,90%
FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		934.301.175,-	922.166.175,-	98,70%
7	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	400.876.460,-	400.876.460,-	100,00%
8	Fasilitasi Bantuan Hukum	276.398.795,-	264.263.795,-	95,61%
9	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	257.025.920,-	257.025.920,-	100,00%
FASILITASI KERJASAMA DAERAH		628.599.777,-	528.273.000,-	84,04%
No.	Program dan Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
10	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	274.973.399,-	261.477.500,-	95,09%
11	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	206.088.339,-	131.307.900,-	63,71%
12	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	147.538.039,-	135.487.600,-	91,83%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PEREKONOMIAN		4.346.593.000,-	4.299.038.000,-	98,91%

1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4.085.489.000,-	4.078.894.000,-	99,84%
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	150.000.000,-	124.865.000,-	83,24%
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	111.104.000,-	95.279.000,-	85,76%
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		301.438.200,-	254.907.750,-	84,56%
4	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	121.935.000,-	107.925.000,-	88,51%
5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	24.989.800,-	15.989.750,-	63,99%
6	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	154.513.400,-	130.993.000,-	84,78%
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		499.446.500,-	465.636.500,-	93,23%
7	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	169.500.000,-	154.800.000,-	91,33%
8	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	329.946.500,-	310.836.500,-	94,21%
PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM		438.758.700,-	407.014.200,-	92,76%
10	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	102.575.000,-	86.410.000,-	84,14%
11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	252.663.700,-	244.554.200,-	96,79%
12	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	83.520.000,-	76.050.000,-	91,06%
JUMLAH.....		74.103.921.403,-	64.698.867.202,-	87,31%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjalan dengan “Baik”, hal ini dapat dilihat pada capaian Kinerja rata-rata mencapai 100% (serratus persen).

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan kegiatan – kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi serta program kerja Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2022 dan dijabarkan dalam program dan kegiatan yang disusun setiap tahun.

Kegiatan program tahun anggaran 2022 dapat berjalan dengan lancar berkat koordinasi yang baik serta kerjasama dengan berbagai pihak. Namun demikian kendala yang dihadapi tetap ada tetapi relatif kecil dan dapat diatasi dengan baik dan digunakan sebagai bahan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibuat untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kuala Tungkal, 15 Maret 2023,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**
Ir. H. ~~REZA~~ US SANUSI, M.S.i
PENYELIA UTAMA MADYA
0680817 199203 1 007